LAPORAN

MONITORING HASIL PENGUKURAN KINERJA

PROGRAM DAN KEGIATAN, REALISASI ANGGARAN, DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

TAHUN ANGGARAN 2024

TRIWULAN I

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Laporan Hasil Evaluasi Internal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Kepulauan Selayar Triwulan I Tahun 2024 terdiri atas evaluasi Program/kegiatan, realisasi anggaran, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan pemantauan rencana aksi merupakan sarana penyajian data dan informasi Inspektorat sebagai Instansi Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Hasil evaluasi internal Dinas PMPTSP Kabupaten Kepulauan Selayar penyajianya diupayakan sebaik mungkin dan bertujuan memudahkan para stakeholder dalam mengevaluasi. Kami mengucapkan terima kasih kepada pegawai Dinas PMPTSP Kabupaten Kepulauan Selayar yang telah berpartisipasi dalam penyusunan laporan hasil evaluasi Internal ini dan kami menyadari dengan segala kekurangan, bahwa laporan evaluasi ini masih belum sempurna. Oleh karenanya, dengan segala kerendahan hati kami mengharapkan saran yang membangun agar lebih baik dimasa yang akan datang.

Benteng, Maret 2024
Kepala Dinas PMPTSP,

Drs. H. ANDI NUR HALIQ, M.Si.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19660507 198603 1 022

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ii
Daftar Isi iii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Tujuan 1
C. Gambaran Umum Dinas PMPTSP 1

BAB II EVALUASI
A. Evaluasi atas capaian program dan Kegiatan 7
B. Evaluasi atas Capaian Realisasi Anggaran 10
C. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 13

BAB III PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI
A. Permasalahan 15
B. Rekomendasi 15

BAB III PENUTUP

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permen PAN Nomor: 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laoporan Kinerja serta Permen PAN Nomor: 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015.

Akuntabilitas Kinerja adalah sebagai Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk **mempertangungjawabkan keberhasilan/kegagalan** pelaksanaan **program dan kegiatan** yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara **terukur** dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara **periodik.**

B. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Evaluasi Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Tahun 2024 adalah:

1. Sebagai wujud pertanggungjawaban pengendalian dan pengawasan pelaksanaan program/kegiatan ;
2. Untuk mengetahui keberhasilan serta kegagalan pada pencapaian program dan kegiatan pada Triwulan I Tahun 2024;
3. Sebagai tolok ukur perbaikan untuk capaian program/kegiatan triwulan kedepannya.

C. Gambaran Umum Dinas PMPTSP

Dinas PMPTSP sebagai instansi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki gambaran berikut:

1. Peringkat : B

2. Alamat : Jalan Jend Ahmad Yani Mal Pelayanan Publik (MPP)Benteng Kab.Kepulauan Selayar
3. Email : DPMPTSP.selayar@gmail.com
4. Titik koordinat : **S** 6,11924, **E** 120,467141
5. Foto kantor

Gambar 1.1

1. Struktur Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi

Kepala Dinas PMPTSP mempunyai Tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Struktur kelembagaan Dinas PMPTSP yang menjadi tanggung jawabnya sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis, operasional di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai kebijkasanaan perundang-undangan yang berlaku;
b. Penyiapkan pelaksanaan kegiatan Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
c. Pemberian perizinan dan pelayanan umum dibidang tugasnya;
d. Pelaksanaan pelayanan administrasi Dinas;
e. Pelaksanaan tugas-tugas pembantuan dari pemerintah yang menjadi tanggung jawabnya;
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Tugas Kepala Dinas PMPTSP dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan daerah, meliputi:

a. Menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
f. Menyelenggarakan dan merumuskan kebijakan teknis penanaman modal;
g. Menyelenggarakan dan merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
h. Menyelenggarakan menyelenggarakan dan merumuskan kebijakan teknis pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
i. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
j. Menyelenggarakan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
k. Mengoordinasikan dan menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
l. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
m. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
n. Menyusun laporan pelaksanaan Tugas Kepala Dinas dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
o. Menyelenggarakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Struktur Organisasi berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris terdiri dari;
   - Subbagian Umum
3. Bidang Penanaman Modal;
4. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
5. Kelompok Jabatan Fungsional;

Gambar 1.2
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

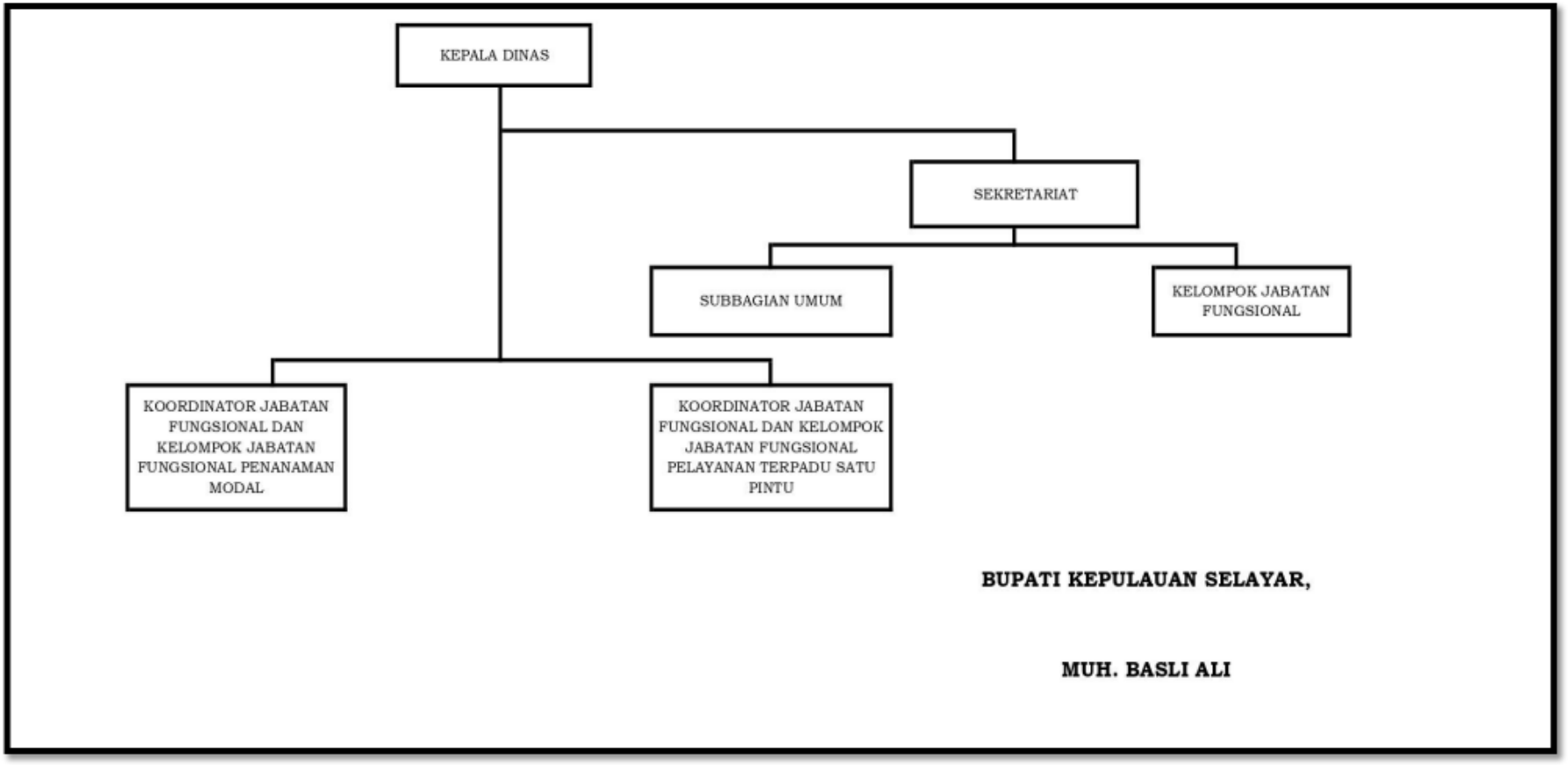

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

MUH. BASLI ALI

Dinas PMPTSP merupakan salah satu perangkat daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar yang memiliki variasi SDM mulai dari Kepala Dinas sampai dengan staf, merupakan kesatuan dalam mewujudkan visi, misi, program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang telah direncanakan.

2. Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan, Perangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural

Keadaan Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan jabatan Tahun 2024 sebagai berikut :

- JPTP = 0 orang
- Administrator (Kelas 12) = 1 orang
- Administrator (Kelas 11) = 3 orang
- Pengawas = 3 orang
- Pelaksana = 15 orang
- Fungsional = 6 orang

Jumlah = 26 orang

Untuk mengetahui sumberdaya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Selayar, berikut disajikan tabel 1 :

Tabel 1.1
Susunan Kepegawaian Dinas PMPTSP
Kabupaten Kepulauan Selayar
Berdasarkan Komposisi Golongan dan Eselon Per 31 Maret 2024

No	Tingkat pendidikan	Golongan			Jumlah	Eselon				Jumlah	Pegawai Kontrak	Pegawai Sukarela
		IV	III	II		II	III	IV	Staf			
1	Strata Dua (S2)	2	2	-	4	1	2	-	2	5	-	-
2	Strata Satu (S1)	2	11	-	13	-	1	1	11	13	16	-
3	Diploma	-	1	-	1	-	-	-	1	1	-	-
4	SLTA	1	3	4	8	-	-	-	7	7	6	-
Jumlah		5	17	4	26	1	3	1	21	26	22	-

Sumber data : Subag. Umum, Dinas PMPTSP Kab. Kepulauan Selayar Desember Tahun 202

Berdasarkan alokasi jumlah pegawai yang tersedia sebagaimana dalam tabel 1.1 tersebut maka dapat dikatakan bahwa jumlah pegawai pada Dinas PMPTSP Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dikatakan sudah presentatif hanya saja jika dilihat dari segi pendidikannya Sebagian belum sesuai kualifikasi dengan jabatannya.

BAB II
E V A L U A S I

A. Evaluasi atas Capaian Program dan Kegiatan

Evaluasi atas capaian program dan kegiatan pada triwulan I tahun 2024 sebagai berikut :

No.	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	5	6	7	8	9
1	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Capaian Kinerja (%)**	**70,28%**	14%	14%
		Persentase Capaian Kinerja Keuangan (%)	85,00%		
	a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	16,2	15%
	1) Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	1 dok	50 %
	2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	1 Dok	100 %
	3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA perubahan SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD	1 Dok	-	-
	4) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok	100 %
	5) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA perubahan SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi Penyusunan DokumenPerubahan DPA-SKPD	1 Dok	-	-
	6) Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan		100 %
	7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	4 Dok	100 %
	b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang akuntabel yang disusun	100 %	15,42%	15,42%
	1) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN	26 orang/bulan	26	86 %
	2) Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	1 Dok	1 Dok	100 %

No.	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	5	6	7	8	9
	3) Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulanan/ semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran yang tersedia	1 dok	1 dok	100%
	4) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	15 dok	3 dok	25 %
	c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah	100%	22%	22%
	1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Barang Milik Daerag SKPD yang disusun dan dilaporakan	3 Dok	3 Dok	100 %
	2) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah yang disusun dan dilaporkan	8 Dok	-	-
	3) Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan barang milik daerah yang disusun dan dilaporkan	3 Dok	-	-
	d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah	100%	13,43%	13,43%
	1) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	2 paket	100 %
	2) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
	3) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD	100 laporan	30 laporan	17,14 %
	e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana prasarana perkantoran yang tersedia	100%	10%	10 %
	1) Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Gedung Kantor atau BangunanLainnya yang Disediakan	-	-	-
	2) Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan disediakan	1 unit	-	-
	3) Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yangDisediakan	Unit	-	-
	f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan administrasi perkantoran	100%	9,6%	9,6%
	1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	3 laporan	100 %
	2) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Layanan umum Kantor yang tersedia	3 laporan	-	-
	g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	100%	-	-
	1) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dandibayarkan Pajaknya	2 unit	-	-
	2) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yangDipelihara	25 Jenis	-	-
	3) Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-

No.	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	5	6	7	8	9
	4) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 unit		
2	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor PMDN/PMA	32 Perusahaan	-	-
	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan Penerimaan Misi penanaman modal	3 kali	2 kali	60,67 %
	1) Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 Dok	-	-
3	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA) (Rp. Juta Rupiah)	67.000	-	-
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Nilai Realisasi Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Rp. Juta Rupiah)	67.000	-	-
	1) Penyelesian permasalahan dan hambatan yang di hadapi pelau usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya				
	2) Bimbingan teknis kepada pelaku usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	204 Pelaku Usaha	-	-
	3) Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan SinkronisasiPengawasan	13 kegiatan usaha	-	-
4	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Potensi untuk peluang Investasi daerah (%)	60%	-	-
	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/ insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kab/ kota	Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah	15 perusahaan	-	-
	1) Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah	2 dok	-	-
5	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Izin yang diterbitkan (%)	100%	18,09%	18%
	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penerbitan izin perizinan dan non perizinan	1400 izin	18,09%	18%
	1) Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegarsi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang MendapatkanPelayanan Terpadu Perizinan dan Non PerizinanBerbasis Sistem Pelayanan Perizinan BerusahaTerintegrasi Secara Elektronik	1400 izin (Pelaku Usaha)	398 Izin (Pelaku Usaha	18,09%
	2) Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan KomitmenPerizinan Berusaha dan Non Perizinan	13 Kegiatan Usaha)	-	-
	3) Penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berbasis resiko	Jumlah orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	4 pelaku usaha	-	-

No.	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	5	6	7	8	9
	4) Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	-	-	-
6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase pemenuhan permintaan data dan informasi yang diterima secara online dan terintegrasi (%)	100%	25 %	25 %
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan permintaan data dan informasi yang diterima	100%	25 %	25 %
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegarsi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan NonPerizinan Berbasis Sistem Pelayanan PerizinanBerusaha Terintegrasi Secara Elektronik yangDiolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12 Dokumen	3 Dokumen	25 %

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa capaian program dan kegiatan triwulan I tahun 2024 mencapai 22,46 %. atau rata-rata ***rendah*** karena masih terdapat beberapa program/kegiatan yang belum terlaksana.

B. Evaluasi atas Capaian Realisasi Anggaran

Evaluasi atas capaian realisasi anggaran pada triwulan I tahun 2024 sesuai tabel sebagai berikut :

No.	Urusan Pemerintahan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
1	*2*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.527.036.022	616.299.716	13,61%
		a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.000.000	-	-
		1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000	-	-
		2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	3.500.000	-	-
		3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.500.000	-	-
		4) Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	3.500.000	-	-
		5) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3.500.000	-	-
		6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000	-	-
		7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000	-	-
		b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.623.150.000	527.604.162	11,30%
		1) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	2.631.150.000	527.604.162	11,30%

No.	Urusan Pemerintahan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
1	*2*	*5*	*6*	*7*	*8*
		2) Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000	-	-
		3) Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulanan/ semesteran SKPD	3.000.000	-	-
		4) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4.000.000	-	-
		c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	10.000.000	-	
		1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	3.000.000	-	-
		2) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	3.000.000	-	-
		3) Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	4.000.000	-	-
		d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	247.037.100	41.244.400	16,70%
		1) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	8.285.100	-	-
		2) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.020.000	-	-
		3) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	234.768.000	41.244.400	30,60%
		e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	480.950.000	-	-
		1) Pengadaan Aset Tak Berwujud	-	-	-
		2) Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan (insentif fiscal)	352.950.000	-	
		3) Pengadaan peralatan dan mesin lainnya (insentif fiscal)	128.000.000	-	-
		f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	406.050.900	35.151.285	8,67%
		1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	141.748.000	35.151.285	24,79
		2) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	264.302.900	-	-
		g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82.926.000	5.274.000	6,36%
		1) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	43.016.000	5.274.000	12,26%
		2) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	33.270.000	-	-
		3) Pemeliharaan/rehanilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	-	-	-
		4) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan Perizinan kendaraan dinas atau operasional lapangan	6.640.000	-	-
2.	Urusan Penanaman Modal	2. Program Promosi Penanaman Modal	40.000.000	-	-
		Kegiatan Penyelenggraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota	40.000.000	-	-
		1) Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000	-	-
		3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	668.117.000	-	-

No.	Urusan Pemerintahan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
1	*2*	*5*	*6*	*7*	*8*
		Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	668.117.000	-	-
		1) Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	94.217.000	-	-
		2) Bimbingan teknis kepada pelaku usaha	385.466.000	-	-
		3) i Pengawasan Penanaman Modal	188.434.000	-	-
		4. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	10.000.000	-	-
		Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/ insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kab/ kota	10.000.000	-	-
		1) penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	10.000.000	-	-
		5. Program Pelayanan Penanaman Modal	60.200.000	7.025.869	11,67%
		Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	60.200.000	7.025.869	11,67%
		1) Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegarsi secara Elektronik	39.000.000	7.025.869	18 %
		2) Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	1.800.000	-	-
		3) Penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis resiko	12.000.000	-	-
		4) Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	7.400.000	-	-
		6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	19.800.000	-	-
		Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	19.800.000	-	-
		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegarsi secara Elektronik	19.800.000	-	-

Realisasi anggaran Triwulan I sebesar Rp. 616.299.716,- dari Jumlah anggaran Tahun 2024 senilai Rp. 4.669.267.000,- sehingga Persentase rata-rata capaian realisasi Anggaran untuk Triwulan I tahun 2024 sebesar 13,61%

C. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Evaluasi atas capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) triwulan I tahun 2024 Sesuai tabel sebagai berikut :

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET 2024	Realisasi	Persentase Capaian 2024
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*			
1	Mewujudkan reformasi birokrasi Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi Dinas PMPTSP	70,00 (BB)		
		Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas PMPTSP	70 (BB)		
			Laporan Keuangan Dinas PMPTSP sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Sesuai		
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas PMPTSP	75,00%		
2	Meningkatkan Investasi		Persentase Peningkatan Nilai Investasi	2,00 %		
		Meningkatnya kerjasama investasi	Persentase peningkatan investor berskala nasional (PMDN/PMA)	9,00%		
			Persentase peningkatan nilai investasi PMDN berskala nasional	15,00%		
			Persentase peningkatan nilai investasi PMA	6,00%		
		Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik	86,00%		

BAB III
PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI

A. PERMASALAHAN

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) dari bulan Januari sampai dengan Maret 2024, ada beberapa permasalahan yang terjadi diantaranya :

1. Serapan anggaran Dinas PMPTSP masih terbilang rendah yaitu 11,09% karena masih ada beberapa kegiatan pengadaan yang belum terlaksana yang disebabkan oleh mekanisme penggunaan aplikasi perencanaan SIPD belum sepenuhnya dipahami oleh PPTK.
2. Refocussing anggaran Dinas PMPTSP tahun 2024 sehingga kegiatan yang akan dilaksanakan mengalami kendala.

B. REKOMENDASI

Rekomendasi tindak lanjut untuk menghadapi masalah di atas adalah :

1. Perlunya peningkatan kompetensi PPTK terkait penerapan aplikasi SIPD sehingga kegiatan yang akan dilaksanakan tidak salah rekening yang menyebabkan kendala pelaksanaan kegiatan.
2. Perlu adanya kepastian anggaran taktis bagi pemerintah daerah di awal tahun sehingga tidak terjadi refocusing.

BAB IV

P E N U T U P

Demikian laporan hasil evaluasi program/kegiatan/subkegiatan, realisasi anggaran, capaian kinerja utama dan pemantauan rencana aksi disusun untuk memperoleh umpan balik terkait pencapian target sehingga diketahui permasalahan dan rekomendasi untuk bahan perbaikan dan tindak lanjut pada triwulan berikutnya, terima kasih.

Benteng, Maret 2023
Kepala Dinas PMPTSP,

Drs. H. ANDI NUR HALIQ, M.Si.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19660507 198603 1 022